



PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangka Raya, 19 April 2021

Nomor : W16-U/679/OT.01.2/4/2021
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
di-
Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya, maka disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saranperbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d. 100.
Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh nilai sebesar **80,31 (A)** atau **Memuaskan**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 23,40%:

- 1) Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja menunjukkan bahwa sistem perencanaan kinerja cukup baik, namun tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.
- 2) Dokumen Renstra telah menyajikan IKU, namun masih terdapat indikator yang tidak selaras antara lain indikator penyelesaian sisa perkara.
- 3) Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah, namun belum dibuat surat keputusan penetapan Renstra oleh pimpinan.
- 4) Dokumen Renstra belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- 5) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik. Target kinerja ditetapkan terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasinya.
- 6) Rumusan tujuan dalam dokumen Renstra subbab 2.3. dan sasaran strategis dalam dokumen Renstra subbab 2.4. belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024.
- 7) Perubahan dokumen RKT tidak diberi keterangan revisi dan dokumen belum sepenuhnya sebagai acuan dalam menyusun anggaran.

b. Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 20,90%

- 1) Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal.

- 2) Mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berkala.
 - 3) IKU telah direviu secara berkala namun masih terdapat indikator yang tidak selaras dengan IKU Mahkamah Agung RI antara lain indikator penyelesaian sisa perkara.
 - 4) IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,27%**
- 1) LKjIP telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
 - 2) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang memadai dikaitkan dengan pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
 - 3) LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan dan penilaian kinerja.
- d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh 8,75%**
- 1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi telah ada.
 - 2) Telah dilakukan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
 - 3) Hasil pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan penetapan indikator kinerja untuk tahun berikutnya, khususnya untuk indikator kinerja yang capaiannya 0% dan jauh lebih tinggi di atas 100%.
- e. Pencapaian Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 15%**
- 1) Pencapaian sasaran/kinerja satker cukup baik. Namun masih terdapat target *output/outcome* yang tidak tercapai.
 - 2) Informasi *output/outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.
6. Rekomendasi
- Berdasarkan hal di atas direkomendasikan:
- a. Perencanaan Kinerja**
- 1) Mengevaluasi perumusan indikator kinerja agar selaras dengan dokumen Renstra atasannya.
 - 2) Dokumen Renstra agar ditetapkan dengan surat keputusan oleh pimpinan satuan kerja.
 - 3) Dokumen Renstra dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA serta direviu secara berkala.
 - 4) Hasil pengukuran kinerja pada periode tahun sebelumnya dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan target kinerja untuk perencanaan tahun mendatang.

- 5) Tujuan agar diselaraskan dengan dokumen Renstra atasannya, yaitu a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, dan b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Selanjutnya agar dirumuskan indikator kinerja untuk tujuan yang sudah ditetapkan tersebut.
- 6) Perubahan atas dokumen RKT agar diberi keterangan "Revisi RKT".
- 7) Dokumen RKT agar digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Melakukan reviu terhadap keselarasan indikator kinerja satuan kerja dengan indikator kinerja atasannya.
- 2) IKU yang disusun seharusnya dimanfaatkan dalam penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan penganggaran.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) LKjIP seharusnya menyajikan informasi keuangan yang memadai dikaitkan dengan pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
- 2) LKjIP digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja serta digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan penetapan indikator kinerja untuk tahun berikutnya sebagai acuan untuk melihat apakah indikator yang ditetapkan masih relevan atau tidak sebagai ukuran kinerja.

e. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan target yang telah ditetapkan dan keselarasan dokumennya, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau *output/outcome* yang memadai.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,**

Mochamad Hatta

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
TAHUN : 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				23,40
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				7,32
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	Y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	b	0,75	0,75
				1,75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0,75	0,54
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0,71
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	c	0,5	0,36
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,54
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	c	0,5	0,36
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0,75	0,54
				3,57
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0,75	0,75
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	c	0,5	0,50
12	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	b	0,75	0,75
				2,00
II. DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7.5%)				5,88
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1.5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	Y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	Y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0,50
				1,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3.75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0,75	0,47
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0,63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,47
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	b	0,75	0,47
				2,97
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2.25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK)	b	0,75	0,84
11	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	c	0,5	0,56
				1,41

III. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (12,5%)				10,20
a. PEMENUHAN PK (2%)				
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	Y	1	0,67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	Y	1	0,67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0,67
				2,00
b. KUALITAS PK (6.5%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,98
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1,30
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,98
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	b	0,75	0,98
				5,20
c. IMPLEMENTASI PK (4%)				
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0,75	1,00
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	b	0,75	1,00
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0,75	1,00
				3,00
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)				20,90
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)				
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1	2,50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a	1	2,50
				5,00
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)				
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
4	IKU telah menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	b	0,75	0,78
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	b	0,75	0,78
7	IKU telah diukur realisasinya	a	1	1,04
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0,75	0,78
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	b	0,75	0,78
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0,75	0,78
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	b	0,75	0,78
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	a	1	1,04
				9,90
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	c	0,5	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0,75	1,13
17	IKU telah direviu secara berkala	a	1	1,50
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	a	1	1,50
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	b	0,75	1,13
				6,00
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				12,27
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				
1	LKjIP telah disusun	Y	1	1,50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	Y	1	1,50
				3,00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)				
3	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	b	0,75	0,80
4	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	a	1	1,07
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	b	0,75	0,80

6	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	b	0,75	0,80
7	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0,75	0,80
8	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	b	0,75	0,80
9	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	b	0,75	0,80
				5,89
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
10	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0,75	0,84
11	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0,75	0,84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0,75	0,84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0,75	0,84
				3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi	Y	1	2,50
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	a	1	2,50
				5,00
II KUALITAS EVALUASI (5%)				
3	Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	1,88
				1,88
III PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	b	0,75	1,88
				1,88
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	b	0,75	1,88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	1,88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0,75	1,88
				5,63
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	b	0,75	3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	3,13
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0,75	3,13
				9,38
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				
				80,31